

IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA SMPN 50 KOTA SURABAYA DENGAN IKATAN PELAJAR NAHDATUL ULAMA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDATUL ULAMA (IPNU-IPPNU)

Anggi Navyantito

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
anggi.17040674019@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi program kerjasama SMPN 50 Kota Surabaya dengan IPNU-IPPNU. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah hasil transkrip wawancara dan observasi, berupa penilaian hasil survei, sedangkan teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kerjasama ini berjalan efektif, didukung oleh koordinasi yang baik antar unsur terkait, komunikasi yang efektif, serta partisipasi aktif siswa. Program ini berhasil menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan pendidikan karakter siswa di SMPN 50 Kota Surabaya. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program-program serupa di sekolah lain dengan penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu: 1) meningkatkan kualitas komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam program kerjasama IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Surabaya; 2) Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, staf sekolah, dan anggota IPNU-IPPNU harus menjadi prioritas; 3) Pembinaan karakter bagi semua pelaksana program; 4) penyederhanaan prosedur birokrasi, evaluasi terhadap struktur birokrasi yang ada harus dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

Kata kunci: Implementasi program, kerjasama, IPNU-IPPNU, pendidikan karakter

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the collaboration program between SMPN 50 Surabaya City and IPNU-IPPNU. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation. The data sources used are the results of interview transcripts and observations, in the form of assessment of survey results, while the analysis technique uses descriptive qualitative. The research results indicate that the implementation of this collaborative program has been effective, supported by good coordination among the related elements, effective communication, and active student participation. This program has successfully instilled and strengthened the values of religious moderation and character education among students at SMPN 50 Kota Surabaya. This conclusion is expected to serve as a model for similar programs in other schools, with adjustments according to each context and need. Based on the results of the study, suggestions that can be given are: 1) improve the quality of communication between all parties involved in the IPNU-IPPNU cooperation program with SMPN 50 Surabaya; 2) Training and professional development for teachers, school staff, and IPNU-IPPNU members should be a priority; 3) Character building for all program implementers; 4) simplification of bureaucratic procedures, evaluation of the existing bureaucratic structure must be carried out to identify possible obstacles.

Keywords: Program implementation, collaboration, IPNU-IPPNU, character education

PENDAHULUAN

Kebijakan publik suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya (Leo Agustino, 2008: 6). Pada hakikatnya, kebijakan publik adalah sebuah otoritas yang ditetapkan oleh sekelompok individu dengan kekuasaan yang sah dalam sistem

pemerintahan. Keputusan akhir yang sudah ditetapkan bersifat mengikat bagi para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan kebijakan tersebut. Kebijakan publik menjadi elemen penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, tergantung pada pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh pemangku kebijakan. Namun, meski prosesnya sistematis, sering kali kebijakan gagal mencapai sasaran di lapangan. Tahap-tahap kebijakan Publik menurut William N Dunn (20013: 24) di antaranya adalah tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, tahap penilaian kebijakan. Proses kebijakan sering kali dicampuri oleh kepentingan politik dari pihak tertentu, sehingga perumusan dan pelaksanaannya bisa melenceng dari kebutuhan masyarakat.

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama. Pendidikan merupakan proses krusial untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian, dan semangat kebersamaan, yang diperlukan untuk pembangunan diri dan bangsa. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu dan terlibat dalam semua aktivitas manusia.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Pasal 8 Ayat 2C, yang berbunyi Bidang Sekolah Menengah mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain. Oleh karena itu IPNU-IPPNU bekerjasama dengan SMPN 50 Surabaya dalam menanamkan dan memperkuat nilai moderasi beragama dan pendidikan karakter peserta didik melalui program kerjasama yakni Masa Orientasi Pelajar (MOP).



Gambar 1. Proses Kegiatan MOP di Kelas
Sumber: Pers IPNU-IPPNU Sukomanunggal, 2023

Dalam permasalahan sosial di bidang pendidikan yang sering terjadi di Kecamatan Sukomanunggal, terdapat tiga sekolah menengah pertama negeri yang menjadi fokus observasi organisasi kami. Di SMPN 50 Surabaya, misalnya, terdapat banyak siswa yang

melanggar aturan sekolah, menentang perkataan guru, bolos sekolah, mengenakan seragam dengan tidak rapi, serta dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sekitar. Masalah-masalah sosial ini muncul akibat kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap siswa, rendahnya kedisiplinan yang diterapkan oleh sekolah, dan kurangnya penguatan pendidikan karakter (PPK) yang diterapkan. Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi dan alat yang ditawarkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat.

Sebagai organisasi, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) berperan sebagai pelaksana kebijakan dan program Nahdlatul Ulama yang berlandaskan pada Ahlulsunnah Wal Jama'ah. Organisasi ini terdiri dari pelajar yang berasal dari pesantren, madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi, serta memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. IPNU-IPPNU fokus pada pendidikan dan berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi yang mempengaruhi pola pikir dan pergaulan pemuda, terutama di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi keagamaan, pendidikan yang dibawahinya harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, dengan orientasi pada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan membimbing anak menjadi pribadi berkarakter, yakni insan kamil berdasarkan nilai-nilai Islam, menjaga hubungan baik dengan Allah (hablunminallah) dan sesama manusia (hablunminannas) serta alam sekitar.

Pada beberapa kesempatan sebelumnya, SMPN 50 Surabaya telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya bekerja sama dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Surabaya pada tanggal 3 November 2020, kemudian bekerja sama dengan program pemerintah yakni MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) oleh Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya pada tanggal 9 Juni 2022. Selanjutnya yakni bekerja sama dengan anggota Giat Sukomanunggal dalam membantu anak-anak sekolah di penyeberangan SMPN 50 Surabaya. Dengan demikian, SMPN 50 Surabaya cukup aktif dalam menjalin kerja sama dengan membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk kebermanfaatannya siswa-siswinya.

Masa Orientasi Pelajar (MOP) merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk menumbuhkan dan mengembangkan keberagaman, minat, dan potensi pelajar. Kegiatan ini juga bertujuan untuk merangsang kesadaran berkarya kreatif dan kepekaan sosial ketika siswa baru memasuki sekolah dan terlibat dalam berbagai aktivitas yang ada di sekolah. Pelaksanaan MOP menjadi momentum yang tepat untuk mengenalkan dan mengimplementasikan agenda aksi Nasional IPNU IPPNU di bidang pendidikan,

yaitu mencerdaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan seputar nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di kalangan peserta didik. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman bagi penyelenggara dan peserta didik, substansi, tujuan, dan visi dari kegiatan MOP harus tetap mengarah pada tujuan awalnya, yaitu menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan karakter kebangsaan kepada para peserta didik.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Maimun Nuril Lathifah dengan judul “Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Islami Pada Siswa Di Smp Negeri 9 Malang”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yang digunakan pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi telah berjalan cukup baik. Selain itu juga terdapat faktor pendukung eksternal, yaitu menunjukkan bahwa implementasi perencanaan penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 9 Malang melibatkan pembentukan tim PPK, analisis konteks lingkungan, pencantuman kegiatan dalam RKS, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pendidikan. Selanjutnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Abdul Wafi dengan judul “Implementasi Program Kemitraan Sekolah Dengan Dunia Usaha di SMK Negeri 2 Depok” metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Program Kemitraan Sekolah Dengan Dunia Usaha di SMK Negeri 2 Depok kerjasama antara sekolah dan mitra menjunjung tinggi aspek kemitraan, nantinya akan mendapatkan keuntungan bersama yang lebih maksimal. Beberapa faktor-faktor pendukung kemitraan antara lain adalah teknologi, komunikasi, rekrutmen siswa, kepercayaan, dan fasilitas sekolah. Sedangkan faktor-faktor penghambat diantaranya yaitu fasilitas yang ada dan waktu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ruliami Siregar dan Indah Prabawati dengan judul “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid -19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan berdasarkan indikator content of policy yaitu manfaat adanya kebijakan vaksinasi mampu menurunkan kasus pasien positif dan meninggal akibat covid-19 di Puskesmas Kedungdoro.

Dalam konteks ini, IPNU-IPPNU menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan sekolah-sekolah naungannya. Budaya organisasi IPNU-IPPNU diwarnai ajaran dan aqidah Ahlussunnah wal-Jama'ah, yang diterapkan dalam pengembangan dan penguatan organisasi pelajar, ke-aswajaan dan ke-NU-an melalui kegiatan ekstrakurikuler, kajian, dan diskusi. Dengan demikian, IPNU-IPPNU mengembangkan budaya organisasi yang sesuai dengan kehidupan para pelajar,

sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Masa Orientasi Pelajar (MOP) merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk menumbuhkan dan mengembangkan keberagamaan, minat, dan potensi pelajar. Kegiatan ini juga bertujuan untuk merangsang kesadaran berkarya kreatif dan kepekaan sosial ketika siswa baru memasuki sekolah dan terlibat dalam berbagai aktivitas yang ada di sekolah. Pelaksanaan MOP menjadi momentum yang tepat untuk mengenalkan dan mengimplementasikan agenda aksi Nasional IPNU IPPNU di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan seputar nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di kalangan peserta didik. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman bagi penyelenggara dan peserta didik, substansi, tujuan, dan visi dari kegiatan MOP harus tetap mengarah pada tujuan awalnya, yaitu menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan karakter kebangsaan kepada para peserta didik. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian “Implementasi program kerjasama SMPN 50 Kota Surabaya dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU)”

Beberapa definisi implementasi kebijakan menurut para ahli memberikan pandangan yang lebih mendalam. Bardach (dikutip oleh Agustino, 2006:54) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan tidak cukup hanya membuat program dan kebijakan umum yang terlihat bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata atau slogan yang menarik bagi para pemimpin dan pemilih. Dan yang paling sulit adalah melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang. Meter dan Horn (dikutip oleh Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (dikutip oleh Agustino, 2006:139) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa juga berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Jenkins (dikutip oleh Parsons, 2006:463) menyatakan bahwa studi implementasi adalah studi tentang perubahan: bagaimana perubahan terjadi dan bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Secara rinci, kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan, dan pengendalian agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal utama: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kegiatan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Edward III dalam Nugroho,(2009:636) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation (kurangnya perhatian pada implementasi) model yang ia namakan dengan direct and indirect impact on implementation. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Sumber daya adalah faktor kunci dalam implementasi kebijakan, karena setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Meskipun ketentuan atau aturan kebijakan jelas dan konsisten, jika personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk bekerja secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Disposisi, sesuatu yang menunjukkan karakteristik yang erat terkait dengan implementor kebijakan atau program. Disposisi ini menunjukkan sikap para implementor terhadap implementasi kebijakan. Menurut Edward III, para implementor, jika mereka ingin berhasil secara efektif dan efisien, tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga harus memiliki keinginan untuk menjalankannya.

Dewa Ketut Sukardi, dikutip oleh Melania Fandika dkk. dalam jurnal penelitian pendidikan mereka, mendefinisikan ekstrakurikuler sebagai “bentuk kegiatan yang dilakukan di luar jam tatap muka, dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah.” Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan, keberperanan, keikutsertaan pikiran, emosi, serta fisik anggota dalam memberikan kontribusi nyata

terhadap kelompok, komunitas, atau organisasi tertentu dalam mengawal tercapainya visi dan misi bersama.

Partisipasi yang efektif tidak hanya meningkatkan keberhasilan program atau kegiatan tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan komitmen individu terhadap tujuan bersama. Partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk partisipasi pasif, konsultatif, kolaboratif, dan aktif (Arnstein, 1969). Manfaat partisipasi meliputi peningkatan kualitas keputusan dan hasil kegiatan, pengembangan kapasitas individu dan kelompok, serta penguatan demokrasi dan akuntabilitas (Cornwall, 2008). Namun, hambatan seperti kurangnya informasi, sikap apatis, ketidakseimbangan kekuasaan, dan kendala struktural dapat menghalangi partisipasi (Pretty, 1995). Untuk meningkatkan partisipasi, penting untuk menyediakan informasi yang cukup, mengembangkan keterampilan partisipasi, memastikan inklusivitas, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan memahami konsep partisipasi dan berbagai aspeknya, kelompok atau organisasi dapat lebih efektif dalam melibatkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya keikutsertaan siswa dalam organisasi adalah seberapa jauh seorang siswa terlibat di dalam kegiatan organisasi itu baik berupa fisik maupun mental sehingga dapat menjadikan partisipasinya itu bermanfaat bagi dirinya.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan wawancara, yang menggunakan data dalam bentuk kata-kata dan gambar. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif digunakan peneliti agar membantu memaparkan dengan jelas bagaimana Implementasi Program Kerjasama IPNU IPPNU dengan SMPN 50 Kota Surabaya. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin lebih jelas mendeskripsikan Implementasi Program Kerjasama IPNU IPPNU dengan SMPN 50 Kota Surabaya. Dengan begitu dapat diketahui secara rinci bagaimana Implementasi Program Kerjasama IPNU IPPNU dengan SMPN 50 Kota Surabaya

Fokus dalam penelitian ini yaitu implemetasi program dengan model implementasi George C. Edward III (1984) yang mengukur implementasi program menggunakan 4 faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi

peneliti untuk melakukan observasi. Dalam sebuah penelitian harus mempunyai objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih yaitu di SMPN 50 Surabaya di Jln. Sukomanunggal 93C, Kec. Sukomanunggal, Surabaya.

Sumber data adalah sumber yang diperlukan dalam pengumpulan data untuk penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan berupa dua jenis data: data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui metode survei dengan proses wawancara langsung. Data primer ini merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti individu atau kelompok yang diwawancarai oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara dalam proses mengumpulkan data tentang metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah data atau informasi. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian yang melibatkan komunikasi antara 2 orang atau lebih. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman, pandangan, informasi dari narasumber tentang sebuah topik. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu bentuk sampling nonprobabilitas, Dimana pengumpulan data dilakukan dari beberapa orang yang sudah ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak guru, siswa SMPN 50 Surabaya serta Pengurus IPNU-IPPNU Kota Surabaya terkait untuk lebih banyak mendapatkan data agar dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan data untuk menjawab permasalahan yang ada. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data terkait sebuah penelitian. Dokumentasi penting dilakukan karena dapat menjaga keteraturan dan keakuratan data dalam penelitian. Hal ini dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis dan interpretasi hasil penelitian. Observasi merupakan tata cara pengumpulan data dalam penelitian dengan pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek. Tujuan dari observasi yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang sebuah situasi yang diamati. Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dilakukan dengan melakukan observasi partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Fitrianingrum L, 2021).

Instrumen Penelitian dalam Penelitian Kualitatif yaitu: 1) Panduan wawancara berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas dalam wawancara kualitatif. Panduan wawancara juga dapat berisi contoh-contoh pertanyaan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi peneliti (Merriam, 2009); 2) Daftar periksa observasi adalah alat yang digunakan untuk mencatat dan memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam proses observasi. Daftar periksa observasi membantu peneliti dalam mengorganisir dan mengumpulkan data yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi program kerjasama antara IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Kota Surabaya menunjukkan beberapa temuan penting, yakni *Pertama*, koordinasi antara berbagai unsur yang terlibat, termasuk Kepala Sekolah, guru, dan organisasi sekolah, telah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program sudah berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan. Hal ini juga mencerminkan adanya sinergi yang kuat dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan program.

Kedua, menurut George C. Edward dalam Nugroho, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam program ini telah mendukung keberhasilan implementasi. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan prosedur administrasi yang tepat, termasuk persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Komunikasi yang efektif ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan pelaksanaan program. Komunikasi yang terjalin pada sesama pengurus terjalin dengan baik melalui komunikasi secara langsung, secara tidak langsung maupun dalam rapat antar pengurus guna menyelesaikan permasalahan yang ada (Utami et al., 2023).

Ketiga, partisipasi aktif siswa dalam kegiatan organisasi sangat penting dalam program ini. Keterlibatan siswa dalam organisasi memberikan manfaat positif bagi pengembangan karakter dan keterampilan mereka. Program ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah berbasis agama dan nilai spiritual, tetapi juga menanamkan dan memperkuat nilai moderasi beragama dan pendidikan karakter siswa.

Dan terakhir, struktur birokrasi yang ada telah mendukung pelaksanaan program dengan baik. Semua pihak yang terlibat menjalankan perannya sesuai dengan

fungsi dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari penyusunan konsep kegiatan hingga pengawalan hasil dari Masa Orientasi Pelajar (MOP). Tidak ada kendala berarti yang menghambat pelaksanaan program

Implementasi program kerjasama antara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan SMPN 50 Kota Surabaya menunjukkan berbagai dinamika dan tantangan yang menarik untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program ini berhasil dalam memperkuat pendidikan karakter di kalangan siswa SMPN 50 Surabaya serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi program kerjasama ini. IPNU dan IPPNU melakukan berbagai upaya untuk memastikan informasi terkait program dapat diterima dengan baik oleh semua pihak terkait. Proses komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan organisasi pelajar ini mencakup sosialisasi program kepada siswa, guru, dan orang tua. Penggunaan berbagai media komunikasi, baik formal maupun informal, menjadi kunci dalam menyampaikan tujuan, manfaat, dan prosedur pelaksanaan program. Pada pelaksanaan MOP, pola komunikasi terkait dengan Pendidikan Karakter Peserta didik di SMPN 50 Surabaya sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari keberhasilan dan dukungan pihak sekolah dalam menjalankan program-program sekolah yang berdasarkan pada penanaman nilai agama dan Pendidikan karakter, yakni menargetkan siswa untuk diarahkan dzikir dan berdoa dalam mengawali kegiatan belajar mengajar serta dibimbing untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada disekolah.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Tahir (2014:62) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan program kerja sama IPNU-IPPNU dan SMPN 50 Surabaya dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh IPNU-

IPPNU dan dewan guru SMPN 50 Surabaya. Untuk mengkomunikasikan program Masa Orientasi Pelajar kepada peserta didik maka dalam penyampaiannya harus benar dan tepat agar siswa dapat memahami. Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi



Gambar 2. Audiensi dan Evaluasi Program Kerjasama SMPN 50 Surabaya dengan IPNU-IPPNU

Sumber : Pers IPNU IPPNU Sukomanunggal, 2023.

Delegasi IPNU-IPPNU yang dikirim ke SMPN 50 Surabaya bertugas untuk membimbing peserta dan menyebarluaskan informasi tentang berbagai keuntungan bergabung dalam suatu kelompok. Selain itu, mereka juga sering melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk berbincang dengan anak-anak dan berbagi informasi tentang berbagai acara dan program organisasi yang membantu siswa mengembangkan minat dan keterampilan mereka.

Dalam audiensi dan evaluasi kerjasama anantara SMPN 50 Surabaya dengan IPNU-IPPNU selalu dilakukan secara menyeluruh.

“Terkait keberlanjutan program ini masih akan dibahas kembali dengan para dewan guru SMPN 50, sejauh yang saya liat sudah bagus dalam hal penyampaian materi dan persiapan kegiatan oleh pihak IPNU-IPPNU. Namun untuk keberlanjutan masih akan kami kaji lagi mendatang. Intinya dari tim IPNU-IPPNU sudah bagus” ungkap Waka Kesiswaan SMPN 50 Surabaya, Ibu Dra. Ellysabeth Eva

Sutji Ambarwati, M.Pd pada 20 Juni 2024.

Kegiatan disekolah akan tetap dilaksanakan secara terus menerus, oleh karenanya untuk kedepannya dikaji secara bertahap terkait program kerjasama disekolah untuk para dan untuk para pelajar di Surabaya khususnya Kecamatan Sukomanunggal

2. Sumber Daya

Efektivitas suatu kebijakan bergantung pada sumber daya yang tersedia bagi pelaksana kebijakan, menurut Edward III dalam Widodo (2011:98). Sumber daya yang tidak memadai berarti kebijakan tidak akan terlaksana, terlepas dari seberapa baik aturan dan ketentuan tersebut ditulis atau dikomunikasikan dengan akurat. Terdapat dua jenis sumber daya, yaitu sumber daya manusia (staf) dan sumber daya nonmanusia (sarana atau prasarana). Sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Nugroho. Program kerjasama IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Surabaya juga meningkatkan kapabilitas para pelaksananya Sumber daya yang tersedia untuk mendukung program ini terdiri dari sumber daya manusia, material, dan finansial. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan komitmen anggota IPNU dan IPPNU dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh SMPN 50 Surabaya, seperti ruang kelas, alat peraga, dan materi pendukung lainnya, juga memainkan peran penting dalam kelancaran program. Keterbatasan sumber daya finansial terkadang menjadi kendala, namun upaya kolaboratif dan kreatifitas dalam penggalangan dana membantu mengatasi hal ini.

“IPNU-IPPNU sudah saatnya kembali ke khittahnya, yakni melalui bidang garap pendidikan dengan subjek para pelajar, maka dari itu kami mempersiapkan kader yang siap menjadi fasilitator di sekolah-sekolah, baik dari segi pengalaman dan kemampuan di bidang public speaking,” ujar Rekan Bintang selaku bidang Kaderisasi IPNU-IPPNU dan Penanggung jawab program Masa Orientasi Pelajar pada 21 Juni 2022.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan

baik, dalam pelaksanaannya seluruh unsur dibidang organisasi harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan pola pikir terhadap program kerja sama tersebut.

3. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006). Jika sikap pelaksana kebijakan positif, maka kebijakan akan mudah dilaksanakan; namun, jika sikap pelaksana kebijakan negatif, maka kebijakan akan sulit dilaksanakan.

Disposisi atau sikap dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari IPNU, IPPNU, maupun SMPN 50 Surabaya, berpengaruh signifikan terhadap implementasi program. Sikap positif dan antusiasme yang ditunjukkan oleh anggota organisasi pelajar serta dukungan penuh dari pihak sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan. Komitmen bersama untuk mencapai tujuan program menjadikan kerjasama ini lebih efektif dan efisien.

Siswa SMPN 50 Surabaya merasakan manfaat dari pelaksanaan program MOP yang dilakukan oleh IPNU-IPPNU secara bertanggung jawab, yaitu mereka dapat bersosialisasi dengan materi pelajaran sekaligus mengetahui manfaat dan tujuan positif dari mengikuti kegiatan kelompok yang disesuaikan dengan minat dan kelebihan masing-masing.

“Dalam melaksanakan kebijakan ini semua pihak terlibat. Mulai dari kepala sekolah sampai dewan guru juga. Bentuk dukungan dari sekolah jelas ada. Yaitu tadi memfasilitasi kegiatan sehingga besar harapan bisa berjalan lancar tanpa hambatan apapun dalam pelaksanaan program kerjasama ini,” ujarnya, Ibu Dra. Ellysabeth Eva Sutji Ambarwati, M.Pd. Dalam proses silaturahmi dengan pihak sekolah, dengan tujuan memohon izin dan memaparkan garis besar program kerjasama ini Rekan Guntur juga menambahkan bahwa, “Setelah pihak sekolah dan kami membicarakan garis besar program, kegiatan kami langsung disambut baik dengan langsung membahas teknis kegiatan dan mendukung penuh kegiatan positif

yang ada disekolah,” ujarnya pada 21 Juni 2024.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan publik diperlukan struktur birokrasi yang jelas dan memiliki legalitas (Manshuri & Rahaju, 2023). Kerangka birokrasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program kerjasama IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Surabaya saat ini sudah ada. Artinya, kerangka birokrasi sudah ada mulai dari level layanan sampai level organisasi. Agar masing-masing lembaga yang ditunjuk dapat menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan program, maka lembaga ini dibentuk. Dengan adanya pembagian tanggung jawab dan beban kerja yang jelas, maka lembaga lain akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir membantu dalam memperlancar proses implementasi program. Adanya hierarki dan pembagian tugas yang tepat antara anggota IPNU, IPPNU, dan staf sekolah memastikan setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Struktur birokrasi yang baik juga memungkinkan adanya koordinasi yang efektif, baik secara internal dalam organisasi pelajar maupun eksternal dengan pihak sekolah dan lembaga terkait lainnya.

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program kerjasama IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Surabaya sudah tersedia dengan baik. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu dinas hingga ke level yang paling rendah yaitu organisasi. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan program yang sudah ditentukan. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP). Menurut Ibu Dra. Ellysabeth Eva Sutji Ambarwati, M.Pd selaku Waka Kesiswaan SMPN 50 Surabaya mengatakan :

“Pada pelaksanaan melaksanakan program kerjasama ini, kita sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar prosedur yang berupa teknis atau juknis pelaksanaan melaksanakan sesuai SOP. Secara garis besar dengan melalui persiapan, pelaksanaan

monitoring dan evaluasi lalu yang terakhir memberikan izin terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.”

Pemberian izin pelaksanaan dari pihak sekolah juga melalui prosedur administrasi yang baik dan sesuai SOP, seperti yang disampaikan Rekan Guntur.

“Dalam pelaksanaan aspek kerja sama ini kami melibatkan semua warga disekolah, oleh karena itu kami sebelum memulai kegiatan terlebih dahulu untuk memohon izin dengan dilampirkan hasil pembahasan kami,”.

Penelitian mengenai implementasi program kerjasama antara IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Kota Surabaya menghasilkan beberapa dampak signifikan yakni :

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Adanya program kerjasama ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 50 Surabaya, terutama dalam aspek karakter dan nilai moderasi beragama siswa. Program ini memberikan siswa berbagai pengalaman dan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter.
- b. Penguatan Nilai-Nilai Sosial dan Religius: Implementasi program ini menanamkan dan memperkuat nilai-nilai sosial dan religius pada siswa, yang diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Peningkatan Partisipasi Siswa: Keterlibatan aktif siswa dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh IPNU-IPPNU meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab mereka. Hal ini berdampak positif terhadap pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan kepemimpinan siswa.
- d. Pengembangan Standar Pelayanan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan standar pelayanan di sekolah lain. Model kerjasama yang berhasil diterapkan di SMPN 50 Surabaya dapat dijadikan contoh untuk program-program serupa di tempat lain.
- e. Dukungan terhadap Kebijakan Pendidikan: Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap kebijakan pendidikan yang mendorong kerjasama antara organisasi pelajar dan institusi pendidikan. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pihak dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Hasil yang dilakukan oleh peneliti terdapat hal serupa dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Sinta Noviana Matatta (2018) yang meneliti tentang Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Di Kabupaten Luwu Timur memiliki kesamaan indikator yakni dengan

unsur pemenuhan sumber daya fasilitas sarana dan prasarana dalam hal ini metode. Dengan adanya jumlah SDM yang sudah kompeten menjadikan program bisa terlaksana, namun keterbatasan sumber daya material menjadikan kebijakan pelaksanaan program menjadi cukup terkendala. IPNU-IPPNU melalui program kerjasama MOP mampu dan siap menghadapi permasalahan terkait sosialisasi pendidikan karakter untuk para pelajar. Kemampuan dan kesiapan mereka terlihat dari: Pertama, pengalamannya dalam memberikan aspek edukasi kepada sesama pelajar yakni dengan cara tutor sebaya, yang diharapkan bisa efektif mengubah cara berfikir ke pelajar dengan baik. Kedua, unsur tenaga pendidik seperti guru dan fasilitas yang diberikan sudah memadai, karena diisi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan luas serta sebagian guru juga ada yang berasal dari alumni pesantren. Meskipun demikian, masih terdapat peserta didik yang belum bisa memahami niat dan tujuan, output mereka jikalau ikut suatu organisasi. Kemudian kegiatan MOP di SMPN 50 Surabaya tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada dukungan penuh dari pihak sekolah, dikarenakan pelaksana hanya bisa memfasilitasi sebagai materi, namun untuk perlengkapan penunjang sarana dan prasarana kegiatan masih kurang maksimal.

- f. Perbaikan Komunikasi dan Koordinasi: Penelitian ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program. Hal ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam manajemen program pendidikan dan dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi SMPN 50 Surabaya tetapi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan praktik pendidikan dan pengembangan kerjasama organisasi pelajar di berbagai institusi pendidikan lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel ini, diantaranya:

1. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing.
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si dan Bu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing.
3. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.

4. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang dalam bentuk dukungan, nasihat, serta melangitkan doa yang tiada henti.
5. Kakak, Adik, Keponakan serta teman-teman yang selalu senantiasa menemani dan memberikan motivasi.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kerjasama antara IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Surabaya telah berjalan dengan baik. Koordinasi antara unsur-unsur yang terlibat, seperti Kepala Sekolah, guru, dan organisasi sekolah, telah dilakukan secara efektif dengan masing-masing pihak menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Selain itu, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ini juga berjalan dengan lancar sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi.

Komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat serta pelaksanaan prosedur administrasi yang tepat sebelum kegiatan dimulai turut mendukung keberhasilan implementasi program ini. Partisipasi siswa dalam organisasi juga menjadi aspek penting yang dinilai, dengan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan organisasi memberikan manfaat positif bagi pengembangan karakter dan keterampilan mereka.

Program Masa Orientasi Pelajar (MOP) yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah berbasis agama dan nilai spiritual serta menanamkan dan memperkuat nilai moderasi beragama dan pendidikan karakter telah mencapai tujuan yang diharapkan di SMPN 50 Surabaya.

Penelitian ini berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan nilai sosial dan religius, peningkatan partisipasi siswa, pengembangan standar pelayanan, dukungan terhadap kebijakan pendidikan, serta perbaikan komunikasi dan koordinasi dalam program kerjasama pendidikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Kerjasama SMPN 50 Kota Surabaya dengan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPNU-IPPNU), peneliti memberikan saran untuk memperbaiki dan memperlancar pelaksanaan kebijakan diantaranya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam program kerjasama IPNU-IPPNU dengan SMPN 50 Surabaya.

- b. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, staf sekolah, dan anggota IPNU-IPPNU harus menjadi prioritas.
- c. Pembinaan karakter bagi semua pelaksana program, termasuk guru dan anggota IPNU-IPPNU, perlu dilakukan secara berkala.
- d. Perlu dilakukan penyederhanaan prosedur birokrasi, evaluasi terhadap struktur birokrasi yang ada harus dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho. 2009. *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML Dan. Java ANDI*: Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ahmad D. Marimba, 2007, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta; Bumi. Aksara.
- Ahmadi, M. Z. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMPN 3 BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.
- B. Merriam, Sharan & Robin S. Grenier. (2019). *Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis*.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, 8(3), 213-235.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta,. Pustaka Pelajar.
- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gavamedia.
- E. Mulyasa 2011:298 *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fitrianingrum, Lia. 2021. *Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. JPSI (*Journal of Publik Sector Innovations*). Vol. 06, No. 1.
- Hasbullah. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jenkins, Henry. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media. Collide*. New York: New York University Press.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). *Power and Society: A Framework for. Political Inquiry*. <https://doi.org/10.2307/2087983>.
- Lathifah, M. N. (2023). *Implementasi Pogram Penguatan Pendidikan Karakter Islami pada Siswa di SMP Negeri 9 Malang*.
- Majone. Wildavsky. 2002. *Implementasi berbasis kurikulum*. PT. raja grafindo: Jakarta.
- Manshuri, S., & Rahaju, T. (2023). *Implementasi Program Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (Kng) Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya*. *Publika*, 2491–2504. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2491-2504>
- McLaughlin, John A. (2004). *Research and Evaluation. Methods in Special Education*, California: Corwin Press, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, T., dkk. (2014). *Buku ajar asuhan kebidanan nifas (askeb 3)*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Nugroho, Taufan. (2011). *Buku ajar obstetric untuk mahasiswa kebidanan*.Yogjakarta : Nuha Medika.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis. Kebijakan*. Alih bahasa: Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning for Sustainable Agriculture. *World Development*, 23(8), 1247-1263.
- Siregar, R. A., & Prabawati, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*. *Publika*, 471-486.
- Stewart Jr, J., Hedge, D., & Lester, J. P. (2007). *Public policy: An evolutionary approach* (3rd Editio).
- Supardi. (2015). *Penilaian Autentik Pembelajaran Afektif, Kognitif, Psikomotor*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Rineka.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.
- Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utami, D. A., Mahmudah, L. N., Sahilla, F. I., Amaretta, F. R., Aini, K., & Sari, D. C. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(2), 97–104.
- Wafi, H. A. (2019). Implementasi Program Kemitraan Sekolah dengan Dunia Usaha di SMK Negeri 2 Depok. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 8(1), 51-58.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Widodo, Prabowo.P,Dkk, 2011, Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek. Dengan UML, Graha ilmu, Yogyakarta.

